

Total Banten

••• bicara data, bicara fakta

Reklame Bando di Kota Serang
Labrak Aturan Pusat

Perusahaan Cemari Lingkungan
dapat Keringanan

ATAS NAMA INVESTOR

KALI CIPUTAT BERUBAH WAJAH

Meski berita acara serah terima telah ditandatangani sejak September 2011, aset pengganti sungai hingga kini belum sepenuhnya diserahkan kepada negara dan masih tercatat milik pengembang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait status hukum dan administrasi aset tersebut. Selain itu, terdapat catatan bahwa keputusan tersebut ditandatangani oleh pejabat Direktorat Jenderal SDA, bukan langsung oleh Menteri PU.



26 HALAMAN

HARGA
Rp 40.000,-



Aliran Kali Ciputat, Pondok Aren. (Dok)

Di kawasan Pondok Aren hingga Ciputat, perubahan itu tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi juga terasa di bawah tanah sosial warga: banjir yang kian sering, rumah yang dijual, dan memori tentang sungai yang pernah jernih.

Penelusuran lapangan pada 30 April hingga 1 Mei 2026 menunjukkan adanya perubahan signifikan pada sistem aliran Kali Ciputat, terutama di sekitar Pintu Air Nuri, Kelurahan Sawah Lama. Di titik ini, aliran yang dahulu menyambung ke hilir kini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Data citra satelit terbuka memperkuat temuan tersebut. Hingga 2012, aliran kecil Kali Ciputat masih terlihat mengalir dari Pintu Air Nuri, melewati kawasan rel Stasiun Jurangmangu, melintasi ruas tol, hingga menuju Pondok Jaya.

Namun pada 2013, jejak aliran itu menghilang di titik yang sama dengan mulai munculnya pembangunan kawasan komersial yang kini dikenal sebagai pusat perbelanjaan BXChange Mall.

Di atas ruang yang dulu menjadi jalur air, berdiri kompleks komersial modern yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan Bintaro.

Di lapangan, kondisi Kali Ciputat menunjukkan perubahan ekstrem. Pintu air di hulu tampak tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika dibuka, aliran air tidak mengikuti jalur lama, melainkan dialihkan ke sodetan baru yang memutus kesinambungan aliran historis.

Di beberapa segmen, badan sungai menyempit hanya sekitar satu meter. Sedimentasi menumpuk, vegetasi liar tumbuh, dan aliran air kehilangan karakter ekologisnya sebagai sungai perkotaan.

Air baru kembali terlihat di kawasan rumah pemotongan hewan dan SPBE, namun bukan lagi air hulu yang bersih. Aliran tersebut lebih banyak berasal dari limpasan drainase -

ATAS NAMA INVESTOR

Kali Ciputat Berubah Wajah Rakyat Kedatangan Musibah

TOTAL BANTEN - Di antara riuh pembangunan kota satelit Tangerang Selatan, Banten sebuah aliran air yang dulu menjadi nadi kehidupan warga perlahan hilang dari peta visual dan ingatan kolektif. Kali Ciputat—yang dalam catatan kolonial 1937 tercatat sebagai K. Tjiptoetat—kini menyisakan jejak yang terputus, terdesak oleh lanskap beton dan pusat komersial modern.

limbah domestik, dan buangan lain. Warna keruh dan bau menyengat menjadi penanda perubahan fungsi ekologis sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Indra (53), warga sekitar Pintu Air Nuri yang juga anak mantan penjaga pintu air, masih mengingat jelas masa ketika Kali Ciputat menjadi ruang hidup. “Dulu airnya jernih, bisa buat mandi, berenang. Saya pernah menyusuri sampai Pondok Jaya,” katanya.

Pada dekade 1980–1990-an, sungai itu bukan sekadar aliran air, tetapi bagian dari sistem kehidupan agraris. Airnya mengalir sawah, menjadi habitat ikan tawes, gabus, dan betok, serta kerang air tawar. Kini, seluruh fungsi itu telah hilang. “Dulu fungsinya buat sawah, airnya mengalir bagus,” ujarnya.

Perubahan besar disebut mulai terasa setelah proyek rehabilitasi pintu air dan pembangunan tanggul pada 2024. Sejak itu, aliran menuju jalur lama tidak lagi aktif. Dampak perubahan aliran tidak berhenti di hulu. Di wilayah hilir, terutama Komplek Taman Mangu Indah, perubahan pola air mulai dirasakan dalam bentuk yang lebih nyata: banjir yang semakin sering dan mengganggu.

Di RW 12 Kelurahan Jurang Mangu Barat, sedikitnya 38 rumah kini memasang plang “Dijual”. Fenomena ini menguat sejak 2024, beriringan dengan perubahan tata aliran Kali Ciputat.

Seorang warga yang telah tinggal lebih dari 30 tahun mengakui banjir menjadi faktor utama.

“Saya kurang tahu detailnya, tapi yang jelas karena banjir,” ujarnya. Bagi sebagian warga, persoalan ini tidak lagi sekadar teknis drainase, tetapi menyangkut rasa aman dan keberlanjutan hidup di kawasan yang terus berubah. Di sisi lain, pengembang kawasan memberikan narasi berbeda

Alih Fungsi Direstui Pemerintah

Manajemen PT Jaya Real Property Tbk menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari penataan kawasan yang telah melalui kajian panjang dan persetujuan pemerintah. Manajer Perencanaan PT JRP, Virona Pinem, menegaskan bahwa proses tersebut bukan perubahan aliran sungai. "Ini bukan perubahan aliran, melainkan penataan. Persepsinya mungkin berbeda karena belum semua mengetahui," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Tangerang Selatan, 22 April 2026.

Ia juga membantah adanya keterkaitan langsung dengan banjir di wilayah Pondok Aren, dengan merujuk pada hasil kajian teknis yang telah dilakukan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan bahwa pengalihan alur Kali Ciputat telah memiliki dasar hukum resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Kegiatan tersebut, kata dia, merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 298/KPTS/M/2011 tentang kompensasi normalisasi Ruas Sungai Ciputat dan Cibenda. "Kegiatan pengalihan alur sungai sudah memiliki izin berdasarkan Kepmen PU Nomor 298/KPTS/M/2011 tanggal 13 Oktober 2011," ujar Diana, Kamis (7/5/2026).

Dalam kerangka regulasi itu, pengalihan alur tidak berdiri sebagai tindakan tunggal, melainkan bagian dari skema normalisasi sungai dengan syarat adanya sungai pengganti yang memiliki kapasitas minimal setara atau lebih besar.

Di lapangan, tim teknis Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) menemukan adanya perubahan signifikan pada struktur aliran. Saluran sekunder irigasi di kawasan Bintaro disebut telah ditutup dan dialihkan menggunakan box culvert—struktur beton pracetak yang menyalurkan air di bawah permukaan tanah.

"Saluran Sekunder Irigasi ditutup dan dialihkan menggunakan box culvert dengan cara pelurusan dan pengalihan aliran menuju Sungai Ciputat," ujar Diana. Meski secara teknis dinyatakan tetap berfungsi, temuan tersebut membuka kembali pertanyaan tentang kesinambungan aliran alami Kali Ciputat.

STATUS ASET NEGARA YANG BELUM TUNTAS

Salah satu titik krusial dari proyek ini adalah status aset pengganti sungai yang seharusnya telah menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan Kepmen 2011, PT Jaya Real Property Tbk diwajibkan menyerahkan lahan sungai lama seluas 21.966 m² dan lahan pengganti seluas 35.980 m² kepada Kementerian Pekerjaan Umum, lengkap dengan sertifikasi atas nama pemerintah.

Namun dalam praktiknya, Wakil Menteri PU menyebut hingga kini proses serah terima belum tuntas. "Sampai saat ini penyerahan aset pengganti sungai belum berganti kepemilikan, masih milik Jaya Real," kata Diana.

Pemerintah melalui Balai Sungai juga meminta agar aset tersebut segera diserahkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, termasuk perbaikan tanggul sebelum proses finalisasi dilakukan. Di sisi administratif, dokumen mencatat bahwa pada 23 September 2011 telah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima antara Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Jaya Real Property Tbk melalui dua dokumen resmi.

Namun fakta lapangan yang muncul kemudian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara dokumen serah terima dan status penguasaan aktual aset di lapangan. Direktur Serikat Pegiat dan Aktivistis Urusan Publik (Speak Up), Suhendar, menilai dasar hukum pengalihan alur sungai perlu diuji kembali secara lebih ketat.

Menurutnya, perubahan atau tukar guling aset negara semestinya memerlukan persetujuan legislatif sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. "Mesti dikaji dasar Kepmen, sebab peralihan aset negara membutuhkan persetujuan DPR," ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi konflik dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang memberi kewenangan utama kepada pemerintah daerah dalam pengaturan tata ruang wilayah. Suhendar menekankan bahwa sungai pengganti tidak hanya harus ada secara fisik, tetapi juga harus memenuhi tiga syarat utama: berfungsi optimal, memiliki luas setara, dan telah bersertifikat atas nama negara.

Tanpa itu, menurutnya, status legal pengalihan alur masih menyisakan ruang sengketa.

Di atas kertas, pengalihan alur sungai memiliki dasar hukum kuat. Di lapangan, aliran air menunjukkan fragmentasi. Sementara di tingkat warga, dampaknya hadir dalam bentuk banjir, perubahan lingkungan, dan hilangnya ruang hidup lama.



SOROTAN DPR & PEMPROV BANTEN

Respons Politik Menguat, Pemerintah Diminta Bertindak

Taman Mangu Indah salah satu daerah terdampak alih fungsi Kali Ciputat. (dok)

Sorotan terhadap dugaan hilangnya aliran Kali Ciputat di kawasan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, terus menguat seiring temuan lapangan yang menunjukkan perubahan fungsi ruang air menjadi kawasan komersial, termasuk area BXChange Mall.

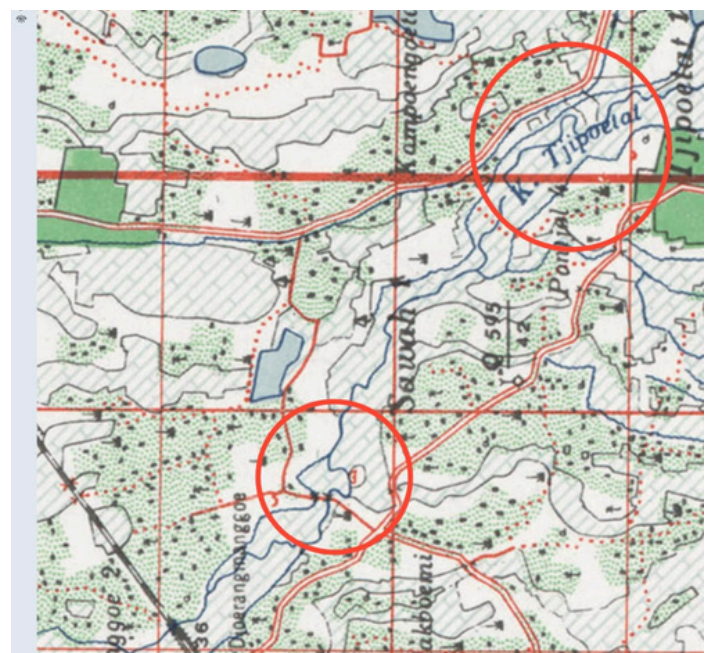
Sejumlah pejabat negara hingga pemerintah daerah mulai angkat suara, meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan perlunya langkah cepat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan dugaan perubahan aliran sungai tersebut. "Pemerintah daerah harus serius mencari solusi. Tidak boleh dibiarkan seperti ini," ujar Dasco, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Dimiyati Natakusumah, menegaskan dugaan penyalahgunaan aliran Kali Ciputat di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan harus segera dihentikan dan ditertibkan. "Tidak boleh. Kalau ada pantai, situ dan sungai disalahgunakan, harus dihentikan dan diberi efek jera," kata Dimiyati menanggapi isu alih fungsi Kali Ciputat di Pendopo Gubernur, KP3B, Serang, Senin (4/5/2026).

Dimiyati menilai, fakta historis dan temuan visual tersebut menjadi dasar kuat untuk melakukan penertiban. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh abai terhadap --

perubahan bentang alam yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Harus segera dibenahi. Penertiban harus dilakukan," ujarnya. Perubahan aliran sungai ini diduga berdampak pada wilayah hilir, termasuk meningkatnya risiko banjir di kawasan permukiman. Bahkan tak sedikit, rumah di Taman Mangun Indah yang dipasang papan "Dijual" karena kerap banjir. "(Penertiban) Itu sudah perintahnya bos kami pimpinan di atas," pungkas Dimiyati. **(Eks)**



Peta Zaman Belanda (dok)

Korban “Birahi” Petugas SPPG Trauma Ratapan Ibu di Serang Setelah Predator Merampas Segalanya

TOTAL BANTEN - Di sebuah sudut sunyi Kecamatan Cikeusal, denyut kehidupan seorang gadis kecil berusia 13 tahun seolah terhenti. Sebut saja namanya Melati (Nama Samaran). Seharusnya, saat ini ia sedang sibuk berdiskusi tentang tugas sekolah atau bermain bersama kawan sebaya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Melati kini terpenjara dalam kamar, mendekap trauma yang tak kunjung pulas.



Ilustrasi Kekerasan Seksual. (dok)

“Tuhan, Kenapa Harus Anak Saya?”

Ratapan itu kerap terbesit di pikiran seorang ibu di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, yang terluka melihat anak gadisnya kehilangan kesucian. Luka yang Melati bawa memang tak berdarah, namun kedalamannya telah mengoyak masa depannya. Di balik dinding rumahnya, kesunyian kerap pecah oleh jeritan histeris.

Melati sering berteriak sendiri setiap kali memori kelam tentang sosok AL (21), pria tetangganya yang tega merenggut kesuciannya, melintas di kepala. "Dia trauma berat. Kalau ingat kejadian itu, dia teriak-teriak. Hati kami sebagai keluarga hancur melihatnya," cerita NR, Kakak korban dikediamannya, Jumat (8/5/2026).

Siapa sangka, AL yang dikenal sebagai pekerja tukang cuci di salah satu kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Serang, menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Sejak Desember lalu, AL mulai mengintai Melati. Motifnya pun mencengangkan sekaligus menyakitkan. "Korban memang masih berusia 13 tahun, namun memiliki postur badan yang besar. Ini yang memicu nafsu bejat tersangka," ungkap Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, Jumat (24/4/2026).

Aksi biadab itu dilakukan AL berulang kali di sebuah ruang kelas yang sedang sepi, tak jauh dari tempat tinggal mereka. Tak cukup hanya melakukan rudapaksa, AL merancang skenario untuk mengunci korban dalam ketakutan abadi.

Secara diam-diam, ia merekam aksi asusila tersebut menggunakan ponselnya. Rekaman video dalam ponsel itu berubah menjadi "borgol digital". Dengan ancaman akan menyebarkan video tersebut, AL memaksa Melati untuk terus menuruti nafsu setannya.

Lebih jauh lagi, ia menjadikan Melati sebagai ATM berjalan. Ketakutan akan aib membuat Melati kehilangan akal sehat. Ia dipaksa mengambil uang dan perhiasan milik ibunya demi memuaskan ketamakan AL. "Awalnya kami kehilangan uang Rp500 ribu, lalu perhiasan emas ibu juga raib. Total kerugian mencapai lebih dari Rp5,5 juta," tambah NR, Kakak.

Misteri hilangnya barang berharga di rumah itulah yang menjadi pintu masuk terungkapnya kasus ini. Orang tua korban yang curiga kemudian menginterogasi Melati dan memeriksa ponselnya.

Di sanalah, seluruh percakapan mengerikan di aplikasi WhatsApp terungkap. Dunia keluarga itu seketika runtuh. Bagi Melati, perjalanan menuju pulih masih sangat panjang. Ia telah memutuskan berhenti sekolah karena tak sanggup menanggung beban malu. "Sejak kejadian sampai sekarang gak masuk sekolah," ungkap NR.

Tak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres Serang untuk bertindak. AL diringkus di kediamannya tanpa perlawanan. Polisi menyita satu unit iPhone 13 Pro Max yang digunakan tersangka untuk merekam aksi bejatnya. Kini, AL terancam hukuman berat di bawah Pasal 473 dan 415 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kekerasan seksual dan pemerasan.



Kepala DKBPPPA Kabupaten Serang, Haerofiatna saat dikediaman korban (Dok)

Sentuhan yang Tak Sembuhkan Luka

Tragedi ini memantik perhatian serius Pemerintah Kabupaten Serang. Pada Jumat (8/5/2026), Kepala Dinas Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA), Haerofiatna, terjun langsung mengunjungi kediaman Melati atas instruksi Bupati Serang.

"Kami hadir untuk memastikan negara ada di samping korban. Kami memberikan dukungan moral, material,

dan memastikan proses hukum dikawal intensif melalui layanan 'Jakia' (Jaksa Sahabat Anak) secara gratis," ujar pria yang akrab disapa Hero tersebut.

Hero menegaskan, DKBPPPA akan mengawal kasus ini hingga kejaksaan dan memastikan Melati mendapatkan pendampingan psikologis agar mau kembali melanjutkan sekolahnya yang kini terputus akibat rasa malu yang mendalam. "Karena korban masih di bawah 18 tahun, pendampingannya akan masuk ke ranah kejaksaan. Kami memiliki zona Jakia yang memberikan layanan gratis sepenuhnya. Selain itu, ada kader, Satgas, dan KPAI yang akan terus mendampingi hingga tuntas," jelasnya.

Sejumlah pegiat perlindungan anak menegaskan bahwa respons cepat pemerintah seperti yang dilakukan DKBPPPA Kabupaten Serang merupakan langkah penting, namun belum cukup untuk menjawab persoalan yang lebih mendasar.

Karena bagi mereka, kasus ini menunjukkan masih adanya celah pengawasan terhadap ruang aman anak, termasuk di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun sekolah. "Pemulihan terhadap korban harus dilakukan secara masif," kata Aktivis Anak Banten, Nurman Azam Kholik.

Nurman menilai, fakta bahwa kekerasan diduga terjadi berulang kali di lokasi yang relatif dekat dengan lingkungan korban, menunjukkan adanya kegagalan sistem deteksi dini. Ia menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga pada upaya pencegahan berbasis komunitas, sekolah, dan keluarga.

"Pendampingan korban itu wajib, tapi yang lebih penting adalah memastikan kejadian seperti ini tidak berulang di tempat yang sama," ujarnya.

Ia juga meminta negara tidak boleh membiarkan korban kehilangan hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan. Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang pemulihan (safe space), bukan tempat yang menambah tekanan psikologis bagi korban. "Anak korban kekerasan tidak boleh sampai putus sekolah. Itu hak konstitusional yang wajib dijamin negara," tegasnya.

Ia mendorong agar sekolah bersama pemerintah daerah menerapkan skema pembelajaran alternatif seperti guru kunjung, pembelajaran di rumah, atau sistem daring dengan pendampingan khusus, jika anak tidak mau berangkat ke sekolah karena masih mengalami trauma.

"Kalau anak belum siap secara mental, pendidikan harus hadir ke rumah, bukan memaksa anak kembali ke sekolah," katanya. Nurman berharap, kasus serupa tidak terjadi lagi di Kabupaten Serang, khususnya di Banten. Ia meminta, para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak sebagai langkah antisipasi.

"Rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat, maka orangtua harus lebih waspada dan perhatian pada anak-anak mereka," pungkasnya. **(Pung)**



Bau Menyengat-Keluhan Gatal Warga Kunciran Kesal

TOTAL BANTEN - Aktivitas pengelolaan sampah di Kampung Kunciran, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, memicu keluhan warga.

Lapak yang dikelola Among di Jalan Raya Gempol RT 01 RW 02 itu disebut menimbulkan gangguan lingkungan, mulai dari bau menyengat hingga keluhan kesehatan.

Mamat, warga setempat, mengatakan keberadaan lapak tersebut mengubah kenyamanan lingkungan dalam beberapa bulan terakhir. Lalu-lalang kendaraan pengangkut sampah jenis bak motor terjadi hampir sepanjang hari.

"Keberatan, benar-benar keberatan," kata Mamat di lokasi, Senin (4/5/2026). Menurut dia, intensitas kendaraan yang keluar-masuk cukup tinggi, bisa mencapai tiga hingga empat kali dalam sehari. Aktivitas itu menimbulkan kebisingan, terutama karena berlangsung dari siang hingga malam. "Bau, kendaraan masuk siang-malam, pulang-pergi berisik," ujarnya.

Selain gangguan kenyamanan, warga juga mulai merasakan dampak kesehatan. Mamat menyebut kemunculan lalat hijau dalam jumlah banyak yang mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk saat makan. Sejumlah warga, kata dia, juga mengalami gatal-gatal pada kulit. "Lalat sudah banyak sekali. Warga, termasuk saya, jadi gatal-gatal, bentol-bentol," ucapnya.

Persoalan lain yang disorot adalah tidak adanya sosialisasi kepada warga sejak awal aktivitas berlangsung. Mamat menegaskan, pengelolaan sampah itu berjalan tanpa komunikasi dengan lingkungan setempat, baik melalui RT maupun RW. "Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Tiba-tiba sudah berjalan," katanya.

Ia membandingkan dengan aktivitas pengepul sampah plastik lain di lokasi yang sama yang sebelumnya melalui komunikasi dengan warga. Berbeda dengan itu, pengelolaan sampah di lapak tersebut disebut berjalan tanpa persetujuan lingkungan.

Terkait kompensasi, Mamat mengaku pernah menerima uang dari pengelola, namun tanpa penjelasan yang jelas.

Ia kemudian menolak pemberian berikutnya. Ia juga mengungkap dugaan intimidasi saat menolak uang tersebut. Menurut dia, dua orang yang diduga dari pihak pengelola pernah mendatanginya, salah satunya membawa senjata tajam.

Meski demikian, ia memilih tidak merespons dan berharap pemerintah setempat segera turun tangan. "Harapannya ditutup, supaya aman dan tidak menimbulkan penyakit," ujarnya.

Sementara itu, Among selaku pengelola membantah bahwa aktivitasnya tidak berizin. Ia menyatakan telah mengantongi izin dari Unit Pelaksana Teknis pengelolaan sampah wilayah timur serta diketahui oleh aparat lingkungan setempat.

"Saya sudah mendapatkan izin dari UPT, RT, RW, dan kelurahan. SKRD juga ada," kata Among.

Ia menyebut kegiatan tersebut telah berjalan selama sekitar enam bulan. Lahan yang digunakan, menurut dia, merupakan milik PT Alam Sultra. Di lokasi yang sama, lapak pengepul sampah plastik disebut telah lebih dulu beroperasi selama bertahun-tahun.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait legalitas, pengawasan, serta dampak lingkungan dari aktivitas tersebut. Warga berharap ada kejelasan sekaligus langkah konkret untuk mengakhiri gangguan yang mereka rasakan. **(Amd)**



Pendiri Total Banten, Engkos Kosasih (dok)

Informasi beredar tanpa proses verifikasi. Potongan video lebih dipercaya daripada penjelasan utuh. Emosi lebih mudah menguasai publik dibanding akal sehat. Dalam keadaan seperti itu, kualitas berpikir masyarakat perlahan mengalami kemunduran. Ruang publik dipenuhi kebisingan, sementara kebenaran sering kali tenggelam di antara kepentingan dan sensasi.

Di tengah situasi itu, banyak media kehilangan arah. Tak sedikit media tumbuh cepat lalu mati perlahan. Bahkan media-media besar nasional mulai melakukan efisiensi karyawan demi bertahan menghadapi perubahan zaman yang begitu brutal.

Industri media sedang berada dalam masa sulit. Kecepatan lebih dihargai daripada ketepatan. Viralitas lebih menguntungkan dibanding integritas. Namun justru di tengah keadaan seperti itulah saya mendirikan media dengan keyakinan yang mungkin terdengar terlalu naif bagi seorang pemula, menjadi **"penjaga akal sehat publik."** Saya sadar betul, kalimat itu bukan sembarang slogan. Menjaga akal sehat publik berarti memilih jalan yang lebih berat.

Artinya media tidak boleh tunduk pada kepentingan sesaat, tidak boleh mudah hanyut dalam sensasi, dan tidak boleh kehilangan keberanian untuk berpijak pada data, fakta, etika, dan hukum. Saya bukan seorang ahli. Saya masih belajar memahami banyak hal tentang dunia media dan jurnalistik.

Saya memulai semua ini dengan keterbatasan pengalaman, keterbatasan sumber daya manusia, bahkan keterbatasan finansial. Saya tahu membangun jurnalisme berbasis data membutuhkan biaya besar, tenaga yang kompeten, proses verifikasi yang panjang, dan kesabaran yang tidak sedikit. Ada banyak malam ketika saya merasa lelah. Ada masa ketika saya mempertanyakan apakah perjuangan ini layak diteruskan.

Membangun Media di Tengah Runtuhnya Kepercayaan Publik

Membangun media pada zaman hari ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan pertarungan antara idealisme, ketahanan, dan keberanian untuk tetap waras di tengah dunia yang semakin bising. Di era ketika teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia memahami informasi, media tidak lagi hanya berhadapan dengan tantangan bisnis, tetapi juga menghadapi runtuhnya kepercayaan publik terhadap kebenaran itu sendiri.

Hari ini semua orang bisa menjadi penyampai informasi. Media sosial menghapus batas antara wartawan, buzzer, propaganda, opini, dan fakta.

Sebab membangun media bukan hanya soal menulis berita. Ini tentang bertahan hidup di tengah tekanan yang datang dari berbagai arah: biaya operasional, persaingan industri, tekanan pekerjaan, hingga tuntutan untuk tetap menjaga kualitas di tengah keterbatasan.

Tetapi setiap kali saya hampir menyerah, saya selalu teringat satu kalimat dari istri saya di rumah: **"Apa yang dimulai, harus diselesaikan. Ingat satu hal, lelaki hidup oleh harga diri."**

Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam kesadaran saya dengan keras. Bahwa hidup bukan hanya tentang berhasil atau gagal, melainkan tentang keberanian menyelesaikan apa yang telah diperjuangkan.

Tentang tanggung jawab untuk tidak lari dari keadaan. Tentang harga diri yang dijaga melalui keteguhan untuk tetap berdiri meski keadaan sering kali melemahkan. Saya juga dibesarkan oleh orang tua yang mengajarkan satu hal penting: jangan pernah mengeluh kepada hidup.

Saya diajarkan untuk terus berjuang tanpa batas, menghadapi keadaan dengan kepala tegak, dan tidak tunduk pada kelemahan.

Didikan itu tertanam kuat dalam diri saya hingga hari ini. Bahwa lelaki tidak diukur dari seberapa sering ia bicara tentang mimpinya, tetapi seberapa kuat ia bertahan memperjuangkannya.

Karena itu saya memilih untuk terus berjalan. Terus belajar. Terus bertumbuh. Saya percaya keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk bekerja lebih keras dan berpikir lebih tajam. Sebab pada akhirnya, membangun media bukan hanya tentang bisnis atau popularitas. Ini adalah tentang menjaga nurani publik agar tidak runtuh sepenuhnya di tengah zaman yang semakin gaduh. **(Engkos Kosasih)**

Indikasi Korupsi Wakil Rakyat di Cilegon Kejaksaan Temukan Kerugian Negara

TOTAL BANTEN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Cilegon tahun anggaran 2024–2025. Temuan awal tersebut kini tengah didalami melalui proses penyidikan.

Kasus ini mencuat dari laporan masyarakat yang menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran reses hingga merugikan keuangan negara. Nilai dugaan penyimpangan disebut mencapai sekitar Rp2,8 miliar dalam periode anggaran tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cilegon, Nasrudin, mengatakan penyidikan difokuskan untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

“Untuk saat ini kami belum menetapkan tersangka. Kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengumpulkan dokumen, serta alat bukti lainnya,” ujar Nasrudin di kantornya, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, penyidik menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan reses dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar. Temuan tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan yang tidak dijalankan sesuai ketentuan.

“Indikasinya ada beberapa kegiatan reses yang tidak dilaksanakan sesuai aturan. Seharusnya kegiatan dilakukan sesuai ketentuan, namun ada yang tidak sesuai sehingga muncul temuan,” jelasnya.

Meski demikian, Kejari belum dapat merinci secara pasti besaran kerugian negara maupun aliran dana, karena proses penyidikan masih berlangsung dan belum memasuki tahap penggeledahan atau penyitaan.

“Kami belum bisa memastikan berapa anggaran yang digunakan dan berapa yang tidak sesuai. Itu akan terlihat nanti saat ada penyitaan atau pengembangan lebih lanjut,” tambah Nasrudin. Ia menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara hati-hati dan transparan, mengingat pentingnya memastikan seluruh alat bukti terkumpul secara lengkap. Nasrudin juga menyebutkan bahwa dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, pihaknya menargetkan adanya perkembangan signifikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.

“Kurang lebih satu bulan kami upayakan ada perkembangan. Namun tidak bisa dipastikan tanggalnya, karena tergantung seberapa cepat tim penyidik menemukan alat bukti,” ujarnya.

Kejari Cilegon memastikan akan menyampaikan setiap perkembangan kasus kepada publik, termasuk saat penetapan tersangka dilakukan. “Nanti pada saat sudah ada penetapan tersangka, akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media, termasuk siapa tersangkanya, perannya, dan hal-hal lain yang berkaitan,” pungkasnya.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Heri Mardiana menolak memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan reses anggota DPRD tahun anggaran 2024–2025. “Aduh jangan ngomongin korupsi dulu yah, jangan ditulis yah,” singkat Sekwan sambil meninggalkan wartawan Total Banten, Sifullah.



PT. CROWN STEEL

PT. CROWN STEEL

**LIMBAH B3
BERBAHAYA
DAN BERACUN**



TANAH TERKONTAMINASI

PT Crown Steel Cemari Lingkungan

DAPAT KERINGANAN KEJARI SERANG, DIKRITIK WALHI

TOTAL BANTEN - Dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Serang justru berujung pada penundaan penuntutan terhadap korporasi. Padahal, hasil pemeriksaan ahli menyebut tanah di lokasi penimbunan limbah telah terkontaminasi logam berat. Untuk pertama kalinya di Indonesia, mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan diterapkan dalam perkara pidana lingkungan hidup.

Skema tersebut diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang kepada terdakwa korporasi PT Crown Steel dalam perkara dugaan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah industri. Perusahaan yang ada di Kawasan Modern Cikande tersebut terbukti mencemarkan logam berat atas aktivitas industri mereka. Mekanisme tersebut resmi dijalankan pada Senin (4/5/2026) di Pengadilan Negeri Serang.

Kasus bermula dari aktivitas produksi PT Crown Steel di kawasan industri Modern Cikande, Kabupaten Serang. Perusahaan pengolahan besi dan baja itu melakukan peleburan besi scrap dengan suhu mencapai sekitar 1.700 derajat Celsius sebelum dicetak menjadi billet dan diolah menjadi besi siku.

Namun di balik aktivitas industri tersebut, ditemukan persoalan serius terkait pengelolaan limbah. Limbah berupa steel slag, mill scale, refraktori bekas, hingga fly ash bottom ash disebut ditempatkan di area terbuka.

Sebagian limbah bahkan digunakan sebagai material urugan di area depan mess karyawan yang kerap tergenang banjir. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli pengelolaan limbah Drs. Iyan Suwargana, tanah di lokasi penimbunan limbah disebut telah terkontaminasi logam berat. "PT Crown Steel tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 maupun non-B3 yang dihasilkan dan melakukan penempatan limbah di lahan terbuka," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang Muhamad Lutfi Andrian dalam keterangan tertulis duitip, Rabu (13/5/2026).

Hasil pengecekan lapangan menunjukkan perusahaan memang telah memiliki bangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3. Namun, rincian teknis penyimpanan limbah belum terintegrasi dalam persetujuan lingkungan perusahaan. Atas dugaan tersebut, korporasi didakwa melanggar Pasal 103 atau Pasal 104 juncto Pasal 116 juncto Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun perkara itu tidak langsung berujung pada proses pidana biasa. Kejari Serang justru menempuh mekanisme DPA setelah melakukan ekspose bersama Asep N. Mulyana selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam sidang di PN Serang, hakim tunggal Hasanuddin memerintahkan PT Crown Steel membuat perjanjian pemulihan lingkungan dengan konsultan.



Sidang Pencemaran Lingkungan di PN Serang.

Majelis hakim kemudian mengabulkan pengajuan DPA antara jaksa dan terdakwa korporasi. Selain dijatuhi denda Rp200 juta, perusahaan juga diwajibkan memulihkan area terdampak dalam waktu maksimal enam bulan sejak putusan dibacakan. Asisten Tindak Pidana Umum sekaligus Pelaksana Harian Kepala Kejari Serang Adi Fakhruddin menyebut mekanisme DPA tersebut menjadi yang pertama diterapkan di Indonesia sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

“Penerapan DPA mempertimbangkan aspek sosial, termasuk keberlangsungan sekitar 200 pekerja yang mayoritas merupakan warga sekitar,” katanya. Kejari Serang menyatakan akan tetap melakukan pengawasan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap proses pemulihan lingkungan yang dijanjikan perusahaan.

“Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, proses penuntutan pidana terhadap korporasi akan kembali dilanjutkan di pengadilan,” pungkasnya.

WALHI; HUKUM JADI AJANG KOMPROMI

Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam perkara dugaan pencemaran lingkungan PT Crown Steel. Walhi menilai penerapan DPA dalam perkara limbah B3 berpotensi menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai ruang kompromi bagi korporasi.

Pengkampanye Perkotaan Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang Eknas Walhi Wahyu Eka Setyawan

mengatakan mekanisme penundaan penuntutan sangat problematik apabila diterapkan pada kasus pencemaran lingkungan yang berdampak jangka panjang. “Kalau secara prinsip, mekanisme penundaan penuntutan dengan metode DPA dalam perkara itu sangat problematik, terutama diterapkan dalam kasus limbah B3. Karena ini kaitannya dengan kontaminasi berat,” kata Wahyu, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, kejahatan lingkungan tidak bisa disamakan dengan pelanggaran administratif biasa karena menyangkut keselamatan publik dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. “Kejahatan lingkungan memiliki dampak jangka panjang, sering kali tidak bisa dipulihkan dan menyangkut keselamatan publik serta lingkungan hidup yang sehat,” ujarnya.

Wahyu menegaskan, pendekatan administratif tidak semestinya menghapus pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pencemaran lingkungan. “Pendekatan administratif seharusnya tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sifatnya harus mutlak,” kata dia.

Ia menilai, mekanisme DPA hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat pengakuan kesalahan, transparansi penuh, pemulihan nyata, serta jaminan pelanggaran tidak akan terulang.

Namun dalam perspektif, penerapan DPA dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak korporasi terhadap pencemaran lingkungan. “Nah ini kan mengacunya ke UU Cipta Kerja. Makanya agak berat kalau pakai DPA, karena rentan memberikan pengampunan kepada korporasi. Seolah cukup memberi sejumlah kerugian lalu tanggung jawab pidananya hilang,” ungkapnya. >

Preseden buruk Penegakan hukum lingkungan

Walhi menilai, mekanisme tersebut berpotensi menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum lingkungan. "Hukum akhirnya jadi ajang kompromi dan tidak membuat efek jera. Nanti kasus pencemaran serupa bisa kembali terjadi dan dibiarkan," tegas Wahyu.

Ia jugamenyebut pemulihan tanah yang telah terkontaminasi limbah B3 membutuhkan waktu sangat panjang, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Pemulihan tanah tercemar logam berat tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu enam bulan seperti yang diputuskan pengadilan.

"Sangat lama, tergantung jenis limbahnya. Kalau sifatnya besar dan meluas bisa sampai 25 tahun. Itu pun harus menggunakan teknologi yang sangat mahal," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, pemulihan limbah B3 bukan sekadar memindahkan material limbah dari satu lokasi ke lokasi lain.

"Kalau enam bulan mungkin hanya memindahkan limbah ke tempat pengelolaan limbah. Itu bukan pemulihan," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses dekontaminasi tanah tercemar membutuhkan teknologi khusus dan biaya besar karena kontaminasi telah masuk ke unsur tanah dan lingkungan sekitar. "Karena kontaminasi tanah dan unsur lainnya membutuhkan waktu sangat lama," kata Wahyu.

Koordinator Bidang Lingkungan Komunitas Olah Pikir Berbasis Nalar (Kopi Nalar), Sudiman meminta agar Kejari Serang serius dalam melakukan pengawasan hasil putusan dalam perkara tersebut. "Ini harus dilakukan pengawasan secara serius, jangan sampai ada kesalahan dan terkesan abai," kata Sudiman.

Sependapat dengan Walhi, Sudiman juga meminta agar Pemerintah Daerah, turut mengawasi pengelolaan lingkungan di PT Crown Steel. Apalagi kata dia, pengelolaan limbah B3 tidak bisa dilakukan serampangan karena berkaitan dengan keselamatan manusia.

"Dalam kasus limbah yang mengandung logam berat penangannya lebih sensitif, karena dapat mencemari tanah, air dan rantai makanan secara jangka panjang. Karena itu pemulihannya membutuhkan waktu lama, sehingga harus diawasi secara ketat dalam pemulihan ini," pungkas Mahasiswa Universitas Banten Jaya ini. **(Eks)**



WAHYU EKA SETYAWAN

Pengkampanye Perkotaan Berkeadilan dan Kebijakan Tata Ruang Eknas Walhi



Tangerang Selatan Bakal Punya PSEL, Dibangun Konsorsium dengan Kapasitas 1.200 Ton Perhari

TOTAL BANTEN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai mempercepat persiapan pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir Cipeucang. Proyek itu disiapkan sebagai fasilitas pengolahan sampah mandiri untuk mengurangi beban timbunan sampah harian di kota tersebut. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah membebaskan lahan seluas lebih dari dua hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

"Saat ini kita membebaskan lahan 2 hektare lebih dengan anggaran yang disiapkan pada APBD. InsyaAllah apa saja yang diminta Danantara bisa dipenuhi. Karena kita ditetapkan sebagai PSEL mandiri di Cipeucang, tidak aglomerasi," kata Pilar di Puspemkot Tangsel, Rabu (13/5/2026).

Menurut Pilar, Pemkot Tangsel juga mulai melakukan penandaan lokasi di sekitar area yang akan digunakan untuk pembangunan PSEL di kawasan TPA Cipeucang.

Fasilitas itu ditargetkan mampu mengolah 1.000 hingga 1.200 ton sampah per hari. Volume tersebut mendekati total produksi sampah harian Kota Tangerang Selatan.

Selain menangani sampah baru, pemerintah daerah berharap fasilitas itu juga dapat mengurangi timbunan sampah lama yang selama ini menumpuk di TPA Cipeucang.

"Kami berharap sampah existing juga bisa ditangani. Supaya lama-lama habis juga yang di TPA Cipeucang," ujar Pilar. Proyek PSEL itu akan dijalankan oleh konsorsium perusahaan yang sebelumnya memenangkan lelang proyek PSEL Tangsel dan kini disebut telah tergabung dalam skema investasi Danantara.

Pemkot Tangsel menargetkan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking dapat dilakukan pada akhir tahun ini, seiring masuknya investor dalam proyek tersebut. "Mudah-mudahan di akhir tahun sudah groundbreaking," kata Pilar. **(Amd)**

CS Network

SOLUSI BISNIS DIGITAL

PEMBUATAN WEBSITE & PT PERORANGAN

MURAH
3,5 JUTA
Punya PT & Website
Selalu dengan Pembiayaan Faktor Pajak

Tingkatkan bisnis Anda dengan legalitas dan website profesional

Contact us
087854473555

Visit Us
Csnetwork@gmail.com

“Membangkang” pada Regulasi? Reklame Bando Masih Bertengger di Kota Serang

TOTAL BANTEN - Sejumlah reklame bando masih berdiri di sejumlah ruas jalan di Kota Serang meski pemerintah telah melarang konstruksi reklame melintang di atas jalan. Beberapa perusahaan reklame bahkan sudah diminta membongkar sendiri konstruksi tersebut sejak September 2025.

Larangan reklame bando sebenarnya bukan aturan baru. Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 melarang bangunan iklan dan media informasi melintang di atas jalan. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 18. Pemerintah Kota Serang juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame yang diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022.

Namun, di lapangan, sejumlah reklame bando masih terlihat berdiri di beberapa titik jalan utama. Berdasarkan dokumen penertiban yang diperoleh, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menggelar audiensi pembongkaran reklame bando pada 3 September 2025.

Dalam surat bernomor B.000.1.5/295/DPUPR/2025, perusahaan pemilik reklame diminta membongkar sendiri bando yang berada di ruas jalan kewenangan Provinsi Banten paling lambat satu bulan setelah kesepakatan dibuat.

“Perusahaan pemilik aset bando agar segera membongkar,” demikian bunyi surat tersebut diikuti pada Rabu (13/5/2026). Sedikitnya ada tujuh perusahaan yang tercantum dalam daftar penertiban. Mereka antara lain PT Immortal Branding, PT Multi Kencana Rona Utama, PT Ghi-Gha Kompania, PT Aneka Karya Advertising, PT Bardie Puri Utama, CV H Agung, dan CV Prima Graha Karya Utama.

Sejumlah titik reklame memang sudah dibongkar. Data pemerintah mencatat reklame milik PT Multi Kencana di Jalan Jenderal Ahmad Yani telah dibongkar. Begitu pula reklame PT Ghiga dekat Polres serta bando di Jalan Raya Serang-Jakarta dekat Universitas Bina Bangsa.

Pembongkaran juga dilakukan terhadap reklame di depan Terminal Pakupatan, Jalan M Syafei Lontar, dan Jalan SA Tirtayasa Royal.

Namun satu titik di Jalan Mayor Syafei tercatat masih dalam proses pembongkaran. Di lapangan, beberapa konstruksi reklame juga masih terlihat berdiri.

Kepala DPMPSTSP Kota Serang Arif Rahman mengatakan pemerintah provinsi telah menyurati para pemilik reklame untuk melakukan pembongkaran mandiri. “Informasinya gubernur melalui PUPR Provinsi sudah menyampaikan surat kepada pemilik bando untuk membongkar,” kata Arif. >>

Menurut Arif, belum seluruhnya reklame dibongkar karena sejumlah perusahaan masih memiliki kontrak dengan pemilik merek yang beriklan. "Jika ada yang belum, mungkin karena masih terikat kontrak dengan brand atau terkendala biaya bongkar," ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, Iwan Sunardi menyebut, reklame bando tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai amanat regulasi. "Ada yang sedang berproses, ada juga yang belum (Punya PBG)," singkat Iwan.

Koordinator Forum Mahasiswa Serang Raya, Muhamad Lutfi menilai, pembiaran terhadap reklame bando ini merupakan cermin lemahnya pengawasan terhadap tata ruang. Ia mengingatkan bahwa pelarangan iklan bando bukanlah kebijakan baru, melainkan mandat regulasi nasional sejak satu dekade silam.

"Secara yuridis, larangan ini sangat terang benderang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010. Pada Pasal 18, ditegaskan bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan. Ini bukan sekadar urusan estetika, melainkan penegakan aturan hukum," ujar Lutfi di Serang, Minggu.

Menurut Lutfi, selain merusak pemandangan kota, konstruksi melintang tersebut menyimpan risiko keselamatan bagi pengguna jalan, terutama saat terjadi cuaca ekstrem. "Kami mendesak pemerintah agar tidak menutup mata. Penertiban harus dilakukan segera sebelum ada kegagalan struktur konstruksi yang memakan korban jiwa," tegasnya.





Wali Kota Serang, Budi Rustandi, perintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindak reklame bando yang terbukti bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan di tengah masih ditemukannya sejumlah konstruksi reklame melintang di atas jalan atau reklame bando di beberapa titik Kota Serang, meski dilarang secara aturan.

Menurut Budi, Pemerintah Kota Serang pada prinsipnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku. "Saya sudah perintahkan kalau aturannya memang tidak boleh secara pusat itu harus dicabut, kirimkan surat," kata Budi melalui sambungan telepon, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan melihat apakah keberadaan reklame tersebut memberikan manfaat bagi daerah, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kalau ada manfaatnya bisa kita masuk ke dalam PAD, cari aturannya. Kalau nggak ada manfaatnya untuk PAD juga enggak masuk dan itu ada larangan-larangan ya cabut aja, sudah saya perintahkan," ujarnya.

Diketahui, pemerintah pusat telah mengatur larangan bangunan iklan atau media informasi melintang di atas jalan.

Sejumlah konstruksi reklame bando di Kota Serang diduga belum memiliki dan tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Kondisi tersebut tidak hanya memunculkan dugaan pelanggaran perizinan bangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian pada penerimaan daerah.

Dalam Pasal 168 ayat (3), Pasal 170 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (2) Perda Kota Serang Nomor 5 Tahun 2025, mengharuskan bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG untuk menyesuaikan diri melalui mekanisme SLF dan penerbitan PBG paling lama 12 bulan.

Dengan menggunakan simulasi konservatif terhadap konstruksi reklame bando permanen, potensi retribusi PBG yang seharusnya diterima daerah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Nilai tersebut masih dapat bertambah apabila jumlah titik reklame yang belum memiliki PBG lebih banyak dari yang teridentifikasi saat ini.

Kepala DPMPSTSP Kota Serang, Arif Rahman, menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki PBG, reklame yang masih beroperasi tetap membayar pajak reklame selama terikat kontrak dengan pihak pengiklan. "Bando meski tidak ber-PBG mereka tetap bayar pajak kalau dikontrak brand," kata Arif saat dikonfirmasi.



DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG

Selamat Hari Raya
Idul Adha

27 Mei 2026 | 1447 H



M. Farhan Azis, S.Ak., M.Sc
Wakil Ketua



Roni Alfanto, S.E
Wakil Ketua



H. Mujirohman, S.H
Ketua



Hasan Basri, S.Ag
Wakil Ketua



Iwan Setiawan, S.Sos., M.m
Sekretaris DPRD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN



DSDABMBK

DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

SELAMAT HARI RAYA
IDUL ADHA

10 Dzulhijjah 1447 H

27 Mei 2026



H. Benyamin Davnie
WALI KOTA TANGERANG SELATAN



H. Pilar Saga Ichsan
WAKIL WALI KOTA TANGERANG SELATAN



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Selamat Hari Raya

Idul Adha

27 Mei 2026/1447 H

Di hari yang suci ini, mari kita perbaharui niat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semoga pengorbanan kita membawa berkah bagi diri kita dan umat.



H. BAHRUL ULUM, S.Ag., M.AP
Ketua

AGUS WAHYUDIONO, S.Si
Wakil Ketua II

H. MAKSUM, S.Sos
Wakil Ketua I

H. ABDUL GOFUR, SH., MH
Wakil Ketua III

Drs. RADEN LUKMAN, M.Si
Sekretaris



Menjemput Kesejahteraan di Era Digital: Catatan May Day 2026 dari Kota Serang

TOTAL BANTEN - Pagi itu, atmosfer 1 Mei kembali membawa gaung yang sama di berbagai sudut negeri: sebuah perayaan, sekaligus pengingat atas keringat yang mengalir demi roda ekonomi yang terus berputar. Hari Buruh Internasional, atau yang karib kita sebut sebagai May Day, di tahun 2026 ini bukan lagi sekadar seremoni turun ke jalan.

la telah bertransformasi menjadi momentum krusial untuk menatap ulang masa depan ketenagakerjaan kita, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi. Di Kota Serang, gaung perubahan itu disuarakan dengan tegas dari kursi parlemen.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, yang bertindak atas nama pimpinan, anggota, dan seluruh sekretariat legislatif, menyampaikan sebuah refleksi mendalam, bukan sekadar ucapan selamat normatif. "Buruh Sejahtera, Kota Serang maju," ucap Muji, Jumat (1/5/2026).

Sebuah kalimat pendek, namun merangkum sebuah hubungan kausalitas yang absolut: sebuah kota tidak akan pernah bisa melompat maju jika pilar utamanya—yakni para pekerja—masih tertatih memikirkan isi dapur.

Bagi Muji Rohman, May Day 2026 harus menjadi titik balik reformasi ketenagakerjaan. Tantangan buruh hari ini sudah jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Ekosistem kerja yang adil dan aman kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

DPRD Kota Serang pun menegaskan komitmennya untuk berdiri sebagai benteng pengawal kebijakan yang berpihak pada hak-hak pekerja. Namun, apa sebenarnya arti kesejahteraan hakiki di era modern ini?

Menurut Muji, menyempitkan arti kesejahteraan hanya pada angka upah minimum adalah sebuah kekeliruan cara pandang. Kesejahteraan buruh adalah sebuah paket utuh yang mencakup tiga pilar utama:

1. Jaminan Sosial yang Kokoh: Perlindungan yang memastikan pekerja dan keluarganya merasa aman saat menghadapi risiko kerja.
2. Layanan Kesehatan Prima: Hak dasar yang menjamin tubuh-tubuh yang lelah bekerja tetap mendapatkan perawatan yang layak.

3. Peningkatan Kompetensi (Upskilling): Senjata utama agar tenaga kerja lokal tidak tergilas oleh kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi di era digital.

Pesan paling kuat yang dilemparkan oleh politisi Serang ini adalah tentang pentingnya meruntuhkan dinding ego sektoral. Sejarah mencatat, hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah sering kali terjebak dalam pola konfrontatif. Padahal, ketiganya berada di atas perahu yang sama.

"Mari perkuat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja," ajak Muji dengan tegas. Ia percaya bahwa tanpa kolaborasi yang harmonis, kesejahteraan yang dicita-citakan hanya akan berakhir menjadi jargon di atas kertas spanduk demonstrasi.

May Day 2026 di Kota Serang pada akhirnya menyisakan sebuah pekerjaan rumah besar. Ketika lampu-lampu panggung perayaan mulai padam, komitmen pengawalan regulasi dari gedung DPRD kini dinanti oleh ribuan buruh yang menggantungkan asa pada kebijakan yang lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah kota dinilai dari seberapa sejahtera pekerja paling bawahnya.

Dilansir dari situs Universitas Brawijaya, sejarah May Day berakar dari perjuangan kelas pekerja di Amerika Serikat, khususnya di Chicago, pada tahun 1880-an. Pada masa itu, buruh bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi dengan jam kerja bisa mencapai 12 hingga 16 jam sehari, dengan upah yang minim dan tanpa jaminan keselamatan kerja. Puncaknya terjadi pada 1 Mei 1886, ketika itu sekitar 300 ribu buruh di seluruh AS menggelar aksi mogok kerja besar-besaran menuntut penerapan jam kerja 8 jam sehari. **(Dir)**

Tekan Pengangguran, Pemkab Tangerang Cetak 1.700 Tenaga Kerja Terampil dan Ratusan Wirausaha Baru

TOTAL BANTEN – Pemerintah Kabupaten Tangerang terus menggenjot program penciptaan lapangan kerja di tengah tantangan tingginya angka pengangguran dan terbatasnya daya serap industri. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas pelatihan kerja, program pemagangan, serta mencetak ratusan wirausaha baru (WUB) yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa pelatihan kerja tidak lagi cukup hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi harus mampu membuka peluang kerja nyata maupun mendorong masyarakat membangun usaha mandiri. Pernyataan itu disampaikan Maesyal saat menyerahkan bantuan peralatan usaha kepada para wirausaha baru sekaligus membuka kegiatan pembekalan kewirausahaan di Balai Latihan Kerja (BLK) Jayanti, Selasa (5/5/2026).

"Di BLK Jayanti saat ini ada sekitar 142 peserta yang sedang mengikuti pelatihan. Kami juga telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk membuka kesempatan pemagangan bagi para peserta," kata Maesyal.

Menurut dia, program pemagangan menjadi jembatan antara dunia pelatihan dan kebutuhan industri. Selama satu bulan, peserta mendapatkan kesempatan belajar langsung di perusahaan dengan dukungan fasilitas transportasi dan uang saku. Pemkab Tangerang berharap peserta yang menunjukkan disiplin, tanggung jawab, dan kinerja baik selama masa magang berpeluang direkrut menjadi karyawan tetap.

Maesyal menjelaskan, keberadaan BLK di Jayanti, Jati Mulya, dan Kosambi menjadi instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Berbagai pelatihan diselenggarakan, mulai dari servis AC, otomotif roda dua dan roda empat, operator forklift, tata boga, menjahit, hingga barista.

Namun demikian, ia mengakui kapasitas industri dalam menyerap tenaga kerja masih memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong lahirnya pelaku usaha baru sebagai alternatif penciptaan lapangan pekerjaan.

"Setelah pelatihan, peserta langsung difasilitasi dengan peralatan usaha agar bisa segera berproduksi dan memperoleh penghasilan," ujarnya. Pada 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menargetkan sebanyak 1.700 peserta mengikuti program pelatihan kerja. Dari jumlah tersebut, 608 orang diproyeksikan menjadi wirausaha baru yang tersebar dalam berbagai sektor usaha produktif.

Target tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. "Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas," kata Maesyal.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, mengatakan program WUB dirancang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis keterampilan. Sepanjang 2026, Pemkab Tangerang telah membentuk sekitar 608 wirausaha baru yang terbagi dalam 38 angkatan pelatihan.

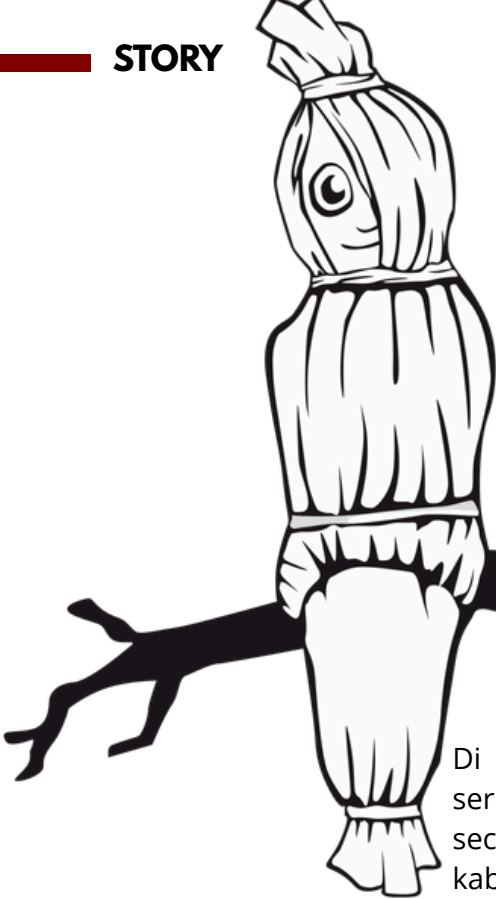
Bidang usaha yang dikembangkan cukup beragam, mulai dari menjahit garmen, bengkel otomotif, las listrik, instalasi listrik, servis AC, tata rias, barista, hingga usaha kuliner seperti bakery, tempe, dan sate bandeng.

"Program ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pelatihan teknis dan kewirausahaan di BLK, pembekalan dan motivasi usaha, serta pemberian bantuan peralatan usaha," ujar Rudi.

Ia berharap para peserta tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitar sehingga dampak ekonomi program tersebut dapat dirasakan lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang juga menyerahkan bantuan peralatan usaha secara simbolis kepada 12 kelompok wirausaha baru yang berasal dari enam kecamatan, yakni Balaraja, Sukamulya, Gunung Kaler, Kronjo, Kresek, dan Sindang Jaya. Kegiatan pembekalan kewirausahaan itu diikuti oleh 144 peserta. **(Zis)**

Dari Tangerang hingga Depok, Benarkah Teror Pocong Jadi-jadian Merebak?



TOTAL BANTEN - Isu tentang "pocong jadi-jadian" kembali menghantui ruang publik pada Mei 2026. Berawal dari sejumlah video yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp, narasi mengenai sosok pocong yang berkeliaran di permukiman warga menyebar cepat dan memicu keresahan.

Cerita yang beredar pun beragam. Ada yang menyebut pocong tersebut mengetuk pintu rumah warga pada malam hari, membawa senjata tajam, hingga digunakan sebagai modus tindak kriminal.

Dalam waktu singkat, kabar itu disebut-sebut telah muncul di sejumlah daerah, mulai dari Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, hingga Sidoarjo.

Namun, di tengah deras arus informasi digital, muncul pertanyaan yang lebih penting: sejauh mana kebenaran isu tersebut?

Di wilayah Tangerang, isu pocong jadi-jadian sempat mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan kepolisian. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, secara terbuka mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terverifikasi.

Menurutnya, isu tersebut diduga dimainkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk menciptakan kepanikan. "Itu hanya isu, masyarakat jangan panik," katanya, Rabu (20/5/2026).

Keresahan warga semakin meningkat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah warga menangkap seseorang yang diduga menyamar sebagai pocong pada dini hari, 20 Mei 2026. Rekaman tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial.

Tak hanya di Kota Tangerang, isu serupa juga mencuat di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Aparat kepolisian bersama pemerintah setempat dikabarkan melakukan penelusuran terhadap laporan warga mengenai sosok yang diduga berkostum pocong dan meresahkan lingkungan sekitar.

Narasi yang beredar bahkan menyebut sosok tersebut membawa senjata tajam. Meski demikian, hingga kini berbagai klaim yang muncul di media sosial tetap memerlukan pembuktian melalui penyelidikan resmi aparat penegak hukum.

Berbeda dengan Tangerang, perkembangan isu di Depok justru mengarah pada bantahan.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa berbagai kabar viral mengenai pocong gentayangan, babi ngepet, hingga keranda terbang tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Ia menilai isu-isu semacam itu hanya memperburuk citra kota dan menjadikan Depok bahan olok-olok di media sosial.

Dengan nada santai, Supian bahkan sempat berkelakar bahwa pocong sudah tidak memiliki ruang untuk gentayangan karena hampir seluruh sudut Depok telah berubah menjadi kawasan perumahan.

Salah satu isu yang sempat ramai berasal dari wilayah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Namun, hingga kini tidak terdapat informasi yang dapat mengonfirmasi adanya penangkapan pelaku yang benar-benar menyamar sebagai pocong atau melakukan aksi teror terhadap warga.

Dengan kata lain, belum terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa fenomena pocong jadi-jadian benar-benar terjadi di Depok sebagaimana narasi yang beredar luas di media sosial. Fenomena pocong jadi-jadian menunjukkan bagaimana sebuah video pendek dapat berkembang menjadi kepanikan massal dalam hitungan jam. Video yang tidak jelas lokasi, waktu, maupun konteksnya dapat dengan mudah diberi narasi baru lalu disebarakan berulang kali melalui media sosial maupun grup percakapan.

Akibatnya, masyarakat di daerah lain ikut merasa terancam meskipun kejadian yang menjadi sumber video belum tentu terjadi di wilayah mereka. Meski sebagian besar kasus masih berputar pada isu dan spekulasi, aparat kepolisian tetap memberikan perhatian serius. Polda Metro Jaya menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang sengaja menggunakan modus pocong untuk menakut-nakuti warga atau melakukan tindak pidana. Bagi aparat, persoalan ini tidak lagi sekadar lelucon ketika telah mengganggu ketertiban umum atau berpotensi menimbulkan kejahatan.



Lebak Tertinggi

INFLASI BANTEN CAPAI 2,70 PERSEN PADA MEI 2026

Ilustrasi Inflasi Banten

TOTAL BANTEN – Laju inflasi di Provinsi Banten pada Mei 2026 masih berada dalam tren terkendali. Namun, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan jasa tetap memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,70 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,62. Dari seluruh wilayah yang menjadi cakupan penghitungan inflasi di Banten, Kabupaten Lebak mencatat inflasi tertinggi, yakni 3,81 persen dengan IHK sebesar 111,90.

Angka tersebut berada di atas rata-rata inflasi Provinsi Banten maupun nasional. Kenaikan inflasi tahunan di Banten dipicu oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 4,96 persen. Kelompok ini masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi pergerakan harga karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tekanan harga juga terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,77 persen. Sementara kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencatat kenaikan sebesar 0,34 persen. Di sektor layanan publik, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 2,49 persen, sedangkan kelompok transportasi naik 1,27 persen.

"Di balik inflasi yang relatif stabil, harga kebutuhan pokok masih menjadi tekanan utama bagi daya beli warga Banten."

Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen. Kenaikan harga juga terlihat pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang mencatat inflasi sebesar 3,05 persen. Sementara kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 3,13 persen, mencerminkan meningkatnya biaya operasional maupun bahan baku usaha kuliner.

Kelompok dengan kenaikan tertinggi tercatat pada perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi hingga 7,57 persen. Tingginya kenaikan pada kelompok ini menunjukkan adanya peningkatan biaya berbagai layanan personal yang digunakan masyarakat.

Secara umum, tingkat inflasi Banten pada Mei 2026 masih berada pada rentang yang relatif moderat. Namun, tingginya inflasi pada kelompok makanan dan jasa tertentu menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya layanan sehari-hari. Data inflasi ini menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga, menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok, serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang. **(Red)**

DPRD Desak Perubahan Strategi Kredit Macet di BPR Serang Rp30 Miliar

TOTAL BANTEN – Di tengah upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Serang masih menghadapi persoalan klasik yang belum terselesaikan: kredit bermasalah. Hingga pertengahan 2026, nilai non-performing loan (NPL) atau kredit macet di bank milik Pemerintah Kabupaten Serang itu tercatat mencapai sekitar Rp30 miliar.

Angka tersebut menjadi beban besar bagi perusahaan sekaligus memicu perhatian DPRD Kabupaten Serang yang meminta adanya langkah penyehatan yang lebih konkret. Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, mengakui tingginya kredit bermasalah masih menjadi tantangan utama perusahaan tahun ini.

Karena itu, fokus manajemen tidak lagi semata mengejar pertumbuhan penyaluran kredit, melainkan memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan yang sudah ada. "Kalau NPL di 2026 memang masih besar, posisinya sekitar Rp30 miliar. Karena itu sekarang fokus kami bukan hanya ekspansi, tetapi bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah yang ada," ujar DadiSenin (25/5/2026).

Menurut dia, meningkatnya kredit macet tidak sepenuhnya dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagian besar nasabah BPR Serang bergerak pada sektor pembiayaan konsumtif sehingga dampak fluktuasi kurs relatif terbatas.

Sebaliknya, tekanan lebih banyak berasal dari kondisi ekonomi domestik yang memengaruhi kemampuan bayar debitur. Sejumlah nasabah dari kalangan pekerja swasta, misalnya, mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga tidak lagi memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kewajiban angsuran. Di sisi lain, penerapan regulasi pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN juga membuat kualitas aset perbankan menjadi lebih sensitif terhadap risiko kredit bermasalah.

Menghadapi situasi tersebut, BPR Serang membentuk tim khusus yang terdiri atas petugas penagihan, pendamping hukum, serta dukungan internal perusahaan guna mempercepat penyelesaian tunggakan kredit. Langkah itu ditempuh untuk mengejar target ambisius menurunkan NPL hingga di bawah Rp10 miliar sebelum akhir tahun. "Kita bentuk tim penagihan, tim lawyer, dan dukungan internal untuk menyelesaikan kredit macet yang ada di BPR. Harapan kami tim ini berjalan efektif sehingga tunggakan bisa tertagih dan NPL turun sesuai target," kata Dadi.



Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Eki Baihaki

Persoalan kredit macet yang belum menunjukkan tren penurunan juga menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Serang. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Eki Baihaki, menilai kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa perusahaan masih dalam kondisi sehat. Menurut dia, manajemen harus mampu menghadirkan inovasi dan strategi baru yang terukur. "Kita minta inovasi-inovasi dari BPR itu sendiri supaya angka NPL bisa turun. Tapi yang kami lihat justru sebaliknya. Ini yang akan kita evaluasi kembali," ujar Eki.

BOX Redaksi

Pimpinan Perusahaan : Engkos Kosasih, **Pemimpin Redaksi**: Andre SN, **Redaktur Pelaksana** : Agus Lani **Redaktur** : Imam Maulana, Hasanudin, Fariz, **Reporter** : D. Amanda, Saepul Aripin (Ipung), Dirhat, Andre Sopian, Abdul Majid, Muhammad Lutfi, Bandi Subandi, **Desain Grafis** : PT Banten Media Network

Penerbit : PT Raya Media Investama

Komplek Perumahan Citra Gading Blok Q4 nomor 3, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

Kontak : Trlp/WA : 087854473555/ Email : totalbanten@gmail.com

DPRD, kata dia, telah meminta laporan kinerja BPR Serang, termasuk capaian triwulan pertama dan triwulan kedua tahun ini. Namun hingga kini laporan tersebut belum diterima oleh Komisi III. Bagi DPRD, laporan tersebut penting untuk melihat sejauh mana efektivitas langkah-langkah yang telah ditempuh perusahaan dalam mengatasi kredit bermasalah.

Menurut Eki, meningkatnya NPL juga mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap proses analisis dan penyaluran kredit. Bank perlu memastikan calon debitur memiliki kemampuan bayar yang memadai sebelum pembiayaan disetujui. "Kami sudah menekankan agar persyaratan pemberian kredit benar-benar matang. Jangan sampai kredit diberikan kepada debitur yang sejak awal berpotensi menjadi kredit macet di kemudian hari," katanya.

Berdasarkan evaluasi DPRD, salah satu sumber terbesar kredit bermasalah berasal dari sektor swasta, terutama debitur yang bekerja dengan sistem kontrak.

Selama masih aktif bekerja, pembayaran kredit umumnya berjalan lancar. Namun ketika kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang, sebagian debitur kehilangan sumber penghasilan sehingga kemampuan membayar angsuran ikut menurun.

Fenomena ini dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya rasio kredit bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. "Salah satu penyumbang terbesar berasal dari sektor swasta. Banyak pekerja kontrak yang saat masih bekerja mampu membayar angsuran. Tetapi ketika kontraknya habis dan tidak diperpanjang, kemampuan membayarnya menurun sehingga kredit menjadi macet," ujar Eki.

Selain pekerja kontrak, kredit bermasalah juga berasal dari debitur yang mengalami perubahan status pekerjaan atau berhenti bekerja sebelum masa pinjamannya berakhir. DPRD Kabupaten Serang menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPR Serang apabila tren kredit bermasalah tidak kunjung membaik.

Evaluasi tersebut tidak hanya menasar efektivitas penagihan, tetapi juga tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga kualitas proses penyaluran kredit.

Bahkan, DPRD membuka kemungkinan membahas langkah yang lebih drastis apabila upaya penyehatan tidak menghasilkan perbaikan yang signifikan. "Yang pasti kita akan meminta pertanggungjawaban dari BPR. Semua akan dievaluasi," kata Eki.

Meski demikian, DPRD masih memberikan ruang bagi manajemen untuk membuktikan efektivitas strategi yang sedang dijalankan. Harapannya, kredit bermasalah dapat ditekan sehingga fungsi BPR sebagai lembaga pembiayaan daerah tetap berjalan sehat dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebab, bagi bank daerah dengan skala usaha yang terbatas, keberhasilan menekan kredit macet bukan hanya soal menjaga laba perusahaan, melainkan juga menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik pemerintah daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang selaku pemegang saham menyatakan memahami kekhawatiran masyarakat terkait meningkatnya kredit bermasalah di PT BPR Serang. Namun, Pemkab menilai persoalan tersebut juga menjadi tantangan yang dihadapi banyak lembaga keuangan di tengah dinamika ekonomi saat ini.

"Sebagai pemegang saham, kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait meningkatnya kredit bermasalah di PT BPR Serang. Namun kami juga melihat ini sebagai bagian dari siklus ekonomi yang sedang dihadapi banyak lembaga keuangan, bukan hanya BPR Serang," kata Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Serang, Febrianto.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan BPR Serang tetap berjalan sehat, prudent, dan berpihak kepada nasabah. Karena itu, pemegang saham bersama komisaris dan direksi didorong untuk duduk bersama merumuskan langkah penyelesaian yang komprehensif. "Yang menjadi fokus kami saat ini adalah memastikan BPR tetap berjalan sehat, prudent, dan berpihak pada nasabah. Karena itu, bersama Komisaris dan Direksi, agar duduk bareng, merumuskan dan membahas cara jalan solusinya untuk mendorong penguatan empat hal," katanya. **(Pung)**



Ekspor Banten Menguat Ketergantungan pada Impor Masih Tinggi

Kinerja perdagangan luar negeri Provinsi Banten menunjukkan tren positif pada April 2026. Nilai ekspor daerah ini mencapai US\$1,26 miliar atau setara sekitar Rp20,6 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS), meningkat 39,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, peningkatan ekspor tersebut belum mampu menutup tingginya nilai impor yang masih mendominasi aktivitas perdagangan.

Pada bulan yang sama, nilai impor Banten tercatat mencapai US\$4,06 miliar atau sekitar Rp66,15 triliun, naik 6,86 persen dibandingkan April 2025. Dengan demikian, Banten masih mengalami defisit neraca perdagangan sekitar US\$2,79 miliar atau setara Rp45,5 triliun dalam satu bulan. Data tersebut tercantum dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada 2 Juni 2026.

Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga April 2026 nilai ekspor Banten mencapai US\$4,26 miliar atau sekitar Rp69,4 triliun, meningkat 2,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan ekspor migas yang melonjak hingga 374,69 persen menjadi US\$102,04 juta atau sekitar Rp1,66 triliun. Sementara itu, ekspor nonmigas yang menjadi tulang punggung perdagangan Banten tumbuh 0,72 persen menjadi US\$4,15 miliar atau sekitar Rp67,7 triliun.

Di antara sepuluh komoditas ekspor nonmigas terbesar, kelompok besi dan baja (HS 72) mencatatkan peningkatan tertinggi. Nilai ekspornya naik 68,51 persen atau bertambah sekitar US\$147,87 juta setara Rp2,41 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebaliknya, komoditas kakao dan olahannya (HS 18) mengalami penurunan terdalam. Nilai ekspor komoditas tersebut menyusut sebesar US\$161,61 juta atau sekitar Rp2,63 triliun, turun 38,83 persen dibandingkan Januari-April 2025.

Dari sisi negara tujuan, Tiongkok masih menjadi pasar utama produk asal Banten dengan nilai ekspor mencapai US\$610,57 juta atau sekitar Rp9,95 triliun. Posisi berikutnya ditempati Amerika Serikat sebesar US\$503,76 juta atau sekitar Rp8,21 triliun, disusul India sebesar US\$309,64 juta atau sekitar Rp5,05 triliun.

Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 34,27 persen dari total ekspor nonmigas Banten. Sementara itu, ekspor ke kawasan ASEAN tercatat sebesar US\$1,08 miliar atau sekitar Rp17,5 triliun, sedangkan ekspor ke negara-negara Uni Eropa mencapai US\$555,76 juta atau sekitar Rp9,06 triliun.

Menurut sektor usaha, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan masih mendominasi struktur ekspor Banten. Pada Januari-April 2026, sektor ini tumbuh 0,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor pertambangan dan lainnya meningkat lebih tinggi, yakni 48,71 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan 23,88 persen.

Dilihat dari pelabuhan muat, sebagian besar ekspor Banten masih diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan nilai mencapai US\$3,21 miliar atau sekitar Rp52,3 triliun, setara 75,37 persen dari total ekspor Banten. Adapun melalui Pelabuhan Cigading tercatat sebesar US\$354,83 juta atau sekitar Rp5,78 triliun, sedangkan melalui Pelabuhan Merak mencapai US\$306,51 juta atau sekitar Rp5 triliun. **(Red)**